

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Kabupaten Demak

Halaman 5

Pemkab Demak Kembali Targetkan Opini WTP

DEMAK - Berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun anggaran 2017 menjadikan Pemkab Demak berupaya mempertahankan prestasi tersebut. Salah satunya dengan memberikan pembinaan intensif para petugas pengelola barang milik daerah. Sebab termasuk di antara poin penilaian BPK adalah pengelolaan aset milik daerah.

Wabup H Joko Sutanto menyampaikan, meski meraih suatu prestasi membanggakan itu sulit, namun mempertahankan prestasi itu lebih sulit. "Termasuk mempertahankan predikat WTP yang tahun lalu sukses diraih Pemkab Demak berkat kerja keras tim di bawah pantauan langsung Bupati HM Natsir," ujarnya, Senin (2/4).

Lebih lanjut wabup yang menargetkan 2018 ini Pemkab Demak juga memperoleh predikat lima daerah terbaik se-Jateng kaitannya LPPD itu mengimbau para petugas pengelola barang milik OPD wajib membuat inventaris data secara terperinci. Setelah itu melaksanakan semua rekomendasi atau petunjuk BPK RI.

"Usahakan tidak mempersulit proses audit BPK yang serentak dimulai 5 April. Jika perlu dampingi mereka, dan jawab pertanyaan sebaik mungkin. Begitu pun berikan data-data yang dibutuhkan," kata wabup.

■ Empat Kunci

Pada pembinaan pengelolaan barang milik daerah bagi pengurus barang di lingkungan pemerintah, Sekda dr H Singgih Setyono MMR menambahkan, setidaknya ada empat hal harus dikerjakan para pengelola barang daerah. Yakni komitmen untuk senantiasa jujur dan dapat dipercaya, memberikan yang terbaik, bersikap positif dan solutif, serta berkepribadian baik.

"Ketika empat kunci sebagai abdi negara itu sukses dilaksanakan, maka optimis anda semua tidak hanya mampu dalam mengelola barang atau aset daerah, namun akan dicari dan dibutuhkan pimpinan di manapun berada," kata sekda.

Sekda menambahkan, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih selama ini bukan menandakan kinerja pemda kurang baik. Hal tersebut terlihat dari hasil audit terhadap keuangan daerah yang tidak pernah ada temuan negatif. Kecuali pengelolaan aset yang perlu dilakukan pembenahan.

"Maka itu tahun lalu Tim Satgas WTP pun dibentuk untuk membantu penataan aset di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan aplikasi standar BPK. Alhamdulillah, opini WTP berhasil diraih," tandasnya. ■ ssi/SR